



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkah Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efisien dan efektif, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Selain itu, sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Samarinda, Februari 2020

Kepala Dinas,

**DIDDY RUSDIANSYAH A.D., S.E., M.M.**

Pembina Utama Madya/.IV.d

NIP. 19640627 199003 1 006

## RINGKASAN EKSEKUTIVE

Dasar pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika di Kalimantan Timur sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh stakeholder sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi Negara.

Rincian capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	Indeks	2,6	3,04	116,92

Walaupun capaian kinerja di tahun 2019 sudah melebihi dari target yang ditentukan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tetap terus meningkatkan pencapaian program/kegiatan yang bermutu dan bermanfaat bagi Kalimantan Timur agar orientasi hasil tidak hanya berdasarkan outcome tetapi juga impact.



## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Sumber Daya Manusia .....	3
E. Aspek Strategis Organisasi .....	8
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	8
G. Sarana dan Prasarana Kerja .....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Perencanaan Strategis .....	11
B. Indikator Kinerja Utama .....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2018. ....	19
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	24
C. Analisis Capaian Kinerja .....	25
D. Realisasi Anggaran .....	34
BAB IV. PENUTUP .....	37
A. Kesimpulan .....	37
B. Saran .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan	4
Tabel 1.1.	Komposisi table Pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Pendidikan	4
Tabel 1.2.	Komposisi table Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	5
Tabel 1.3.	Komposisi table Pegawai berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4.	Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD)	6
Tabel 1.5.	Komposisi table Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD)	7
Tabel 1.6.	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	9
Tabel 2.	PERENCANAAN STRATEGIS	13
Tabel 2.1.	PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNGNYA	14
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	16
Tabel 2.4	Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	17
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	18
Tabel 3.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019	19
Tabel 3.1	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018	20



Tabel 3.2	Predikat Indeks SPBE	24
Tabel 3.3.	Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	24
Tabel 3.4.	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019	25
Tabel 3.5.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018	25
Tabel 3.6.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Target RPJMD/RENSTRA	26
Tabel 3.7.	Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional	26
Tabel 3.8.	Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pernyataan kinerja.	28
Tabel 3.9.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya	33
Tabel 3.10.	Effisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	34
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	34
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran perprogram dan kegiatan	35



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Golongan	6
Grafik 2.	Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Grafik 3.	Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasar jenis kelamin	7



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 3. Laporan Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB Tahun 2019
- Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2019

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lainnya. Dukungan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

### **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni;

- 1) Membantu Gubernur/Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo);
- 2) Bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni;

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), serta bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL);
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), serta bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL);
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), serta bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL);
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), serta bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL);
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur/Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada pasal 2 ayat 1 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut;

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahi subbagian;
  1. Subbagian Perencanaan Program.

2. Subbagian Keuangan.
3. Subbagian Umum.
- C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), membawahi;
  1. Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik.
  2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
  3. Seksi Media Publik dan Pameran.
- D. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membawahi;
  1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi.
  3. Seksi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi.
- E. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan (APTIKA), membawahi;
  1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi.
  2. Seksi Pengolahan E-Government.
  3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.
- F. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo (WASDAL), membawahi;
  1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Informatika dan Penyiaran.
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian KPU /USO.
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Filateli.
- G. Unit Pelaksana Teknis; dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Pranata Humas.
  2. Pranata Komputer.
  3. Arsiparis.

#### **D. Sumber Daya Manusia**

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil sebanyak 121 orang secara keseluruhan yang terdiri dari 61 jumlah orang PNS dan 60 orang jumlah tenaga ahli daya (TKD). Berikut komposisi table pegawai berdasarkan beberapa kriteria;

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan;

No	Jabatan	Golongan				Jenjang Pendidikan						
		IV	III	II	I	Doktor	Magister	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	KepalaDinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	KepalaBidang	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-
5	KepalaSeksi	5	4	-	-	-	5	4	-	-	-	-
6	Staf	2	23	16	2		2	20	2	17	1	
<b>Jumlah PNS</b>		<b>14</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah TKD</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

Tabel 1.1. Komposisi table Pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Pendidikan;

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV-c	S2	1
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1
3	Kepala Sub Bagian	Pembina/ IV-a	S2	1
		Penata Tk. I/ III-d	S2	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1
4	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	3
		Pembina/ IV-a	S2	1
5	Kepala Seksi	Pembina/ IV-a	S2	5
		Penata Tk. I/ III-d	S1	3
		Penata / III-c	S1	1



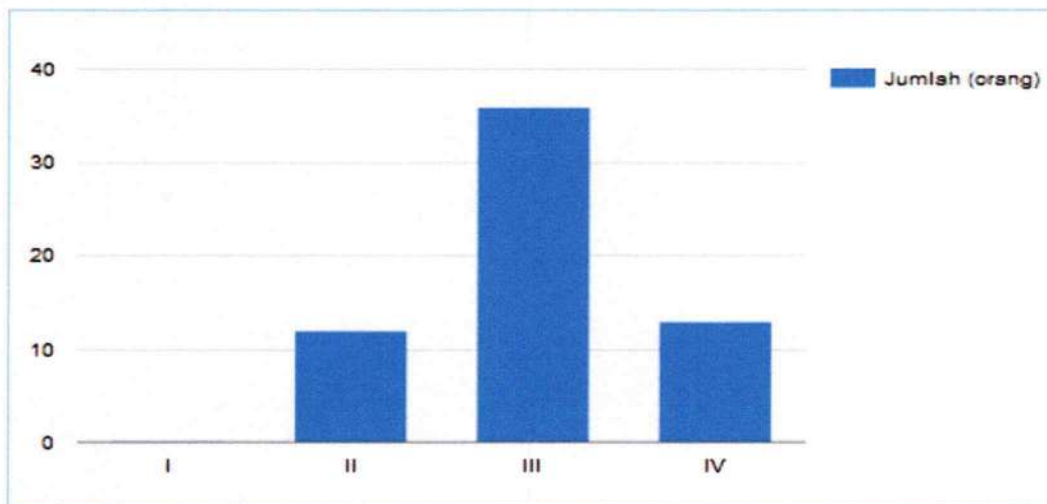
6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1	1
		Pembina / IV-a	S2	1
		Penata Tk. I / III-d	S1	1
		Penata /IIIc	S1	2
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S2	1
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	3
		Penata Muda Tk.I/ III-b	SLTA	2
		Penata Muda/ III-a	S1	10
		Penata Muda/ III-a	D3	1
		Penata Muda/ III-a	SLTA	3
		Pengatur Tk. I/ II-d	D3	1
		Pengatur/ II-c	S1	1
		Pengatur Muda Tk. I/ II-b	S1	2
		Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	12
		Juru Tk. I/ I-d	SLTP	1
		Juru Tk. I/ I-d	SD	1
		Tenaga AlihDaya	S1	32
		Tenaga AlihDaya	D3	5
		Tenaga AlihDaya	SLTA	23
<b>Jumlah</b>			<b>121</b>	

Tabel 1.2. Komposisi table Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian;

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	61	50%
2	CPNS	0	0%
3	Tenaga Ahli Daya	60	50%
<b>Jumlah</b>		<b>121</b>	<b>100%</b>

Tabel 1.3. Komposisi table Pegawai berdasarkan Golongan;

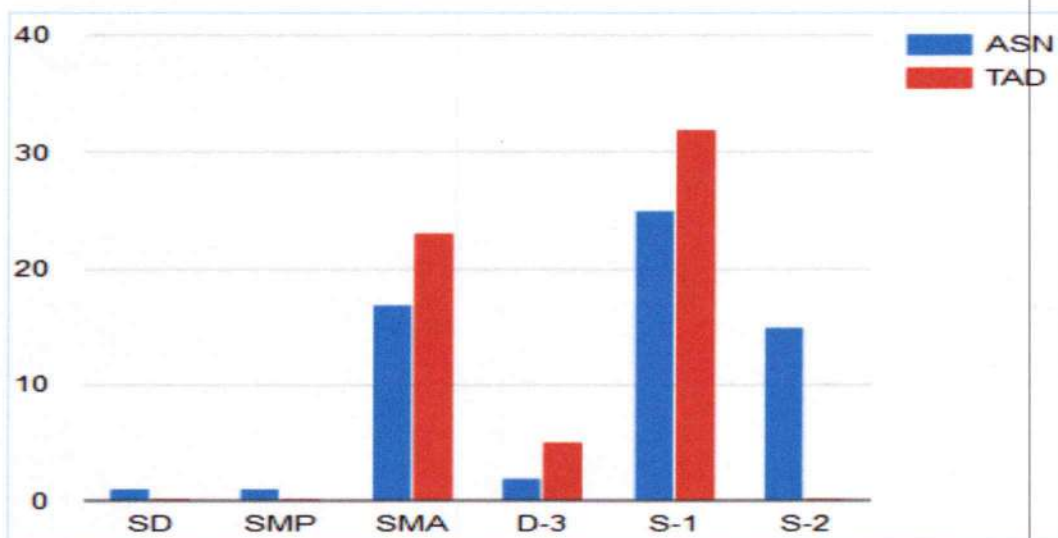
No.	Golongan	Jumlah	Prosentase
1	IV	13	11%
2	III	36	30%
3	II	12	10%
4	I	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>100%</b>



Gambar 1. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD);

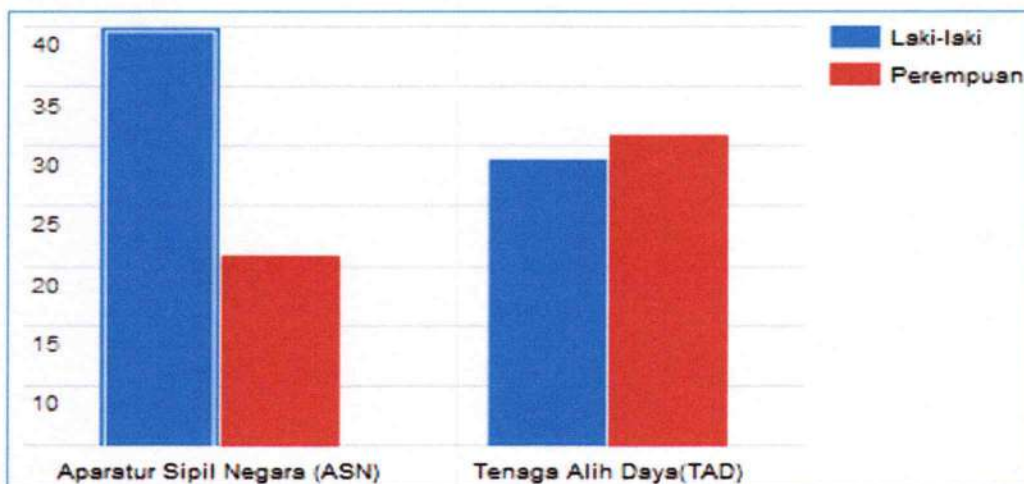
No.	Jenjang Pendidikan	PNS	TAD
1	SD	1	0
2	SLTP	1	0
3	SLTA	17	23
4	D3	2	5
5	S1	25	32
6	S2	15	0
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>60</b>



Gambar 2. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.5. Komposisi table Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD);

No.	JenisKelamin	PNS	TAD
1	Laki-Laki	40	29
2	Perempuan	21	31
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>60</b>



Gambar 3. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasar jenis kelamin

## **E. Aspek Strategis Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang. Peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
  - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
  - b) Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui pembangunan telecenter di kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
3. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik.
4. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian SKPD oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim.
5. Pembangunan Data Center.
6. Dialog interaktif.

## **F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Implementasi SPBE belum optimal.
2. Tuntutan publik terhadap keterbukaan Informasi semakin tinggi.

Sehingga akar permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan Teknologi Informatika dan komunikasi ke depan adalah:

1. Belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu
2. Belum diterapkannya SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
3. Jangkauan infrastruktur TIK seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat belum optimal.
4. Keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi TIK.
5. Belum terstandarisasinya sistem keamanan informasi elektronik (TIK).
6. Masih tingginya konten hoax yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan.
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi hoax.

#### G. Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2.242	m <sup>2</sup>
2	Gedung	2	Unit (2 Lantai)
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	1	Area
9	Ruang Rapat	2	Ruang
10	Ruang Arsip	1	Ruang





11	Ruang CS	1	Ruang
12	Komputer	37	Unit
13	Laptop	52	Unit
14	Ruang Persediaan	1	Ruang
15	Ruang Pengadaan	1	Ruang
16	Mobil Dinas		Unit
17	Mobil operasional	1	Unit
18	Motor Dinas		Unit
19	Kantin	1	Buah
20	Website	1	Buah
21	Papan Pengumuman	1	Buah
22	LED Display	1	Buah
23	Mushola	1	Unit

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategisnya yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Diskominfo tahun 2019 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi, Aplikasi Informatika, Pengawasan dan Pengendalian.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

**"TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR."**

Maksud dari visi diatas adalah "Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas" memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam system pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek system pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

**TABEL 2. PERENCANAAN STRATEGIS**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN S/D TH.2018	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien berorientasi pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Terwujudnya tata Kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE )	Indeks		2,66	2,82	3,03	3,21	3,54

TABEL 2.1. PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNGNYA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien berorientasi pelayanan publik	Terwujudnya tata Kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	Indeks	1 Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa	1	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
					2	Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah
					3	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
					4	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim dan Kab/Kota
					5	Pembinaan dan Pengembangan Telecenter



### B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sebuah instansi pemerintah. IKU Dinas Komunikasi dan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Tenwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks /Predikat SPBE	$\frac{n1}{n0} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>n1 = Nilai Indeks SPBE</p> <p>n0 = Nilai ambang bawah indeks/predikat SPBE yang ditetapkan:</p> <p>a 4,2 = Memuaskan</p> <p>b 3,5 = Sangat Baik</p> <p>c 2,6 = Baik</p> <p>d 1,8 = Cukup</p> <p>e 0 = Kurang</p>	Hasil Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Terwujudnya tata Kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,6

## 1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 21.915.277.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2019 menjadi Rp 26.349.917.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 10.164.417.000,- dan Belanja Langsung Rp 16.185.500.000,-. Adapun realisasi anggaran Rp.23.401.998.017,- (88,81%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 8.560.538.423,- (90,21%) belanja langsung sebesar Rp 14.841.459.594,- (91,69 %).

## 2. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Tabel 2.4. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019		
		ANGGARAN BELANJA (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	%
1	Belanja Tidak Langsung	10.164.417.000	8.560.538.423	90.21
2	Belanja Langsung	16.185.500.000	14.841.459.594	91.69
JUMLAH		26.349.917.000	23.401.998.017	88.81



### 3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	SasaranStrategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Terwujudnya tata Kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	16.185.500.000	100%	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2018

##### 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Peternakan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 56,82 atau dengan predikat penilaian CC (Cukup) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan 2019

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai 2017	Nilai 2018	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	21,05	20,38	-0,67
2	Pengukuran Kinerja	25	11,88	11,88	0
3	Pelaporan Kinerja	15	10,29	10,07	-0,22
4	Evaluasi Internal	10	4,08	5,12	+1,04
5	Pencapaian Kinerja	20	8,75	9,38	+0,63
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>56,05</b>	<b>56,82</b>	<b>+0,77</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	

##### 2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1	<p>Perencanaan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program atau kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran.</li> <li>• Melakukan review terhadap renstra untuk diselaraskan dengan RPJMD dengan berkoordinasi dengan Biro.</li> <li>• Menetapkan dokumen renstra dengan mengacu atau selaras dengan RPJMD, selaras dengan kontrak kinerja, selaras dengan tugas dan fungsi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang di daerah.</li> <li>• Tujuan dan sasaran pada PK relevan dengan IKU yang sudah diformalkan, memenuhi criteria SMART.</li> <li>• Dokumen PK yang dibuat hendaknya memuat sasaran yang akan diwujudkan dalam renstra, target kinerja PK merupakan breakdown dari target-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program/tujuan telah disusun selaras dengan tujuan dan sasaran.</li> <li>• Telah dilakukan review terhadap renstra agar selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines dan isu strategis yang berkembang di daerah.</li> <li>• Tujuan dan sasaran pada PK telah relevan dengan IKU yang sudah diformalkan, dan memuat sasaran yang diwujudkan dalam renstra, selaras dengan tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines, dan mencantumkan target kinerja secara periodic didalam dokumen rencana aksi.</li> <li>• Telah dilakukan monitoring secara periodic terhadap pencapaian hasil kinerja.</li> <li>• Target rencana aksi telah dijadikan dasar untuk memulai pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen</li> </ul>

	<p>target kinerja dalam renstra dan sasaran, indikator dan target yang Ditetapkan dalam PK menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan dokumen PK dengan mengacu/selaras dengan tugas dan fungsi dan menggambarkan core business.</li> <li>• Mencantumkan target kinerja secara periodek didalam dokumen rencana aksi atas kinerja.</li> <li>• Agar dilakukan monitoring secara periodic terhadap pencapaian hasil kinerja.</li> <li>• Agar target rencana aksi dijadikan dasar untuk memulai pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi capaian output kegiatan organisasi.</li> <li>• Perjanjian Kinerja yang dibuat harus selaras dengan kinerja bawahannya.</li> </ul>	<p>kegiatan dan mengevaluasi capaian output kegiatan organisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian Kinerja yang dibuat telah selaras dengan kinerja bawahannya.</li> </ul>	
2	<p>Pengukuran kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU dikatakan cukup apabila representative untuk mengukur kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU telah representative untuk mengukur kinerja yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU menggunakan formula perhitungan yang telah ditentukan</li> </ul>

	<p>yang seharusnya jumlahnya memadai untuk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran rencana aksi agar dimanfaatkan menjadi dasar untuk menyimpulkan progreses, tindak lanjut untuk menyesuaikan strategis agar mencapai tujuan dan sasaran.</li> </ul>	<p>seharusnya jumlahnya memadai dan menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah memanfaatkan Pengukuran rencana aksi sebagai dasar untuk menyimpulkan progreses, tindak lanjut untuk menyesuaikan strategis agar mencapai tujuan dan sasaran.</li> </ul>	<p>oleh PermanpanRB</p>
3	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah atau sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.</li> <li>• Agar laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome serta informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.</li> <li>• Terdapat bukti yang cukup bahwa informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU telah dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah atau sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.</li> <li>• Laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome serta informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.</li> <li>• Telah Terdapat bukti yang cukup bahwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen</li> </ul>

	<p>dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.</p>	<p>informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.</p>		
4	<p>Evaluasi Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi.</li> <li>• Melakukan pemantauan rencana aksi secara periodic baik triwulan, semester dan tahunan.</li> <li>• Melakukan koordinasi yang baik terkait dengan pemantauan rencana aksi .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah melakukan evaluasi terhadap rencana aksi.</li> <li>• Telah melakukan pemantauan rencana aksi secara periodic baik triwulan, semester dan tahunan.</li> <li>• Telah melakukan koordinasi yang baik terkait dengan pemantauan rencana aksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi rencana aksi telah melalui pembahasan secara bertahap melalui rapat triwulan</li> <li>• Pemantauan rencana aksi secara berkala dituangkan dalam bentuk laporan rencana aksi per triwulan</li> </ul>	
5	<p>Pencapaian Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi capaian sasaran kinerja organisasi harus dapat diandalkan dan memenuhi unsure tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang SMART, mencapai target yang telah ditetapkan, tidak lebih buruk dari capaian kinerja tahun sebelumnya, kevalidan data capaian kinerja, dan ketersediaan sumber dokumen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi capaian sasaran kinerja organisasi harus telah memenuhi unsure tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang SMART, mencapai target yang telah ditetapkan, tidak lebih buruk dari capaian kinerja tahun sebelumnya, kevalidan data capaian kinerja, dan ketersediaan sumber dokumen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap penanggung jawab program dan kegiatan telah menyampaikan laporan kegiatan</li> </ul>	

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpan RB No.5 Tahun 2018

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya tata Kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	Indeks	2,6	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	2,6	3,04	116,92

Keterangan : Realisasi merupakan hasil evaluasi SPBE Tahun 2019 dari Kemenpan RB

### C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian sasaran strategis yaitu **"Terwujudnya tata Kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi"** pada tahun 2019 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.4. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	Indeks	2,6	3,04	116,92

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019 telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu **2,6** dengan **predikat baik** sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicapai adalah **3,04** dengan **predikat baik**.

#### 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2019
			2018	2019	
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	Indeks	2,4	3,04	0,26



Pada tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2018 ke tahun 2019, namun baru digunakan sebagai indikator kinerja pencapaian realiasi sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019.

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Tabel 3.6. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Target RPJMD/RENSTRA

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	Indeks	3,5	3,04	0,86

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019 sudah mencapai **3,04** dengan **predikat baik** jauh melebihi dengan target Indeks yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu **2,6** dengan **predikat baik** sehingga untuk mencapai target akhir RPJMD/RENSTRA pada tahun 2023 hanya menambah kekurangan sebesar 0,86 % dari target Indeks yang telah ditetapkan yaitu **3,5** dengan **predikat sangat baik**.

**4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ;**

Tabel 3.7. Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE )	Indeks	2,6	3,04	1,16

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019 sudah mencapai **3,04** dengan **predikat baik** jauh melebihi Standar Nasional Indeks SPBE yang ditetapkan yaitu **2,6** dengan **predikat baik**.

## **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan tercapainya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2019 dalam mewujudkan Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE adalah ;

1. Telah dibentuk Tim Evaluator Internal SPBE melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 491/K.62/2019 tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi SPBE Pemprov. Kaltim. Tim evaluator terdiri dari beberapa unsur perangkat daerah : Diskominfo, Inspektorat, DPMPTSP, Bappeda, BKD, Bapenda, BPKAD, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Adbang.
2. Telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 489/K.518/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemprov. Kaltim. Tim koordinasi terdiri dari Diskominfo = koordinasi strategis spbe, biro organisasi = percepatan spbe, BPKAD = penganggaran, Bappeda = tata kelola dan manajemen data. Pelaksana dalam tim ini adalah semua perangkat daerah.
3. Evaluasi SPBE tahun 2019 dilaksanakan pada bulan oktober, melalui metode pengumpulan data ke perangkat daerah terkait SPBE, maka telah diajukan dokumen evaluasi SPBE dan data dukung ke Kemenpan RB pada oktober 2019 dengan target nilai indeks SPBE 2,76 dengan predikat "baik."

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan SPBE, komitmen Perangkat Daerah yang tidak egosektoral, SDM yang terlatih, dan pendanaan yang baik dari pusat dan daerah.

## **6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pernyataan kinerja.

<b>N O</b>	<b>PROGRAM /KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARG ET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa</b>	<b>1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE</b>	<b>%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>Kabid Aplikasi dan Informatika</b>
		<b>2. Persentase subdomain resmi " Kaltimprov.g o.id" untuk aplikasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim</b>	<b>%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	
		<b>3. Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dalam simpul TIK</b>	<b>%</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>Kabid Teknologi Informasi dan Informatika</b>
		<b>4 Persentase Sinkronisasi data didalam pusat Data API</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	
	<i>1. Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK</i>	<i>Laporan Penilaian Penguatan Manajemen &amp; Tata Kelola TIK di Kab/Kota Se-Kaltim</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>	<i>Kasi Pengelolaan E-Government</i>
	<i>2. Pengelolaa n Aplikasi (Sistem Informasi/ Website)P erangkat Daerah di</i>	<i>Laporan monitoring pendayagunaan aplikasi/website dilingkungan Pemerintah Provinsi Klatim</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>	<i>Kasi Pengolahan Domain dan Aplikasi</i>



	Prov. Kaltim						
	3. <i>Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah</i>	<i>Jumlah PD yang terlayani akses internet pemerintah</i>	<i>PD</i>	3	8	100	<i>Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>
	4. <i>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</i>	<i>Jumlah Distribusi Bandwith pada tingkat PD Prov. Kaltim</i>	<i>Mbps</i>	100	100	100	
	5. <i>Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim dan Kab/Kota</i>	<i>Jumlah Endpoint data yang tersedia dalam pusat API Daerah</i>	<i>Data</i>	20	19	95	<i>Kasi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem informasi</i>
2	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo</b>	1. <b>Persentase Hosting/Co Location Server Perangkat Daerah pada Data Center</b>	%	30	90	100	<b>Kabid Teknologi Informasi dan Informatika</b>
		2. <b>Persentase keamanan sistem informasi Perangkat Daerah</b>	%	70	70	100	
		3. <b>Persentase tersedianya sarana pendukung</b>	%	100	100	100	



		layanan Komunikasi					
		4. Persentase Penyediaan informasi dan data KPU/USO	%	100	100	100	
		5. Persentase data dan Informasi yang ter-Enkripsi	%	80	80	100	
1	Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center dan DRC	Jumlah Aplikasi/web hosting dan colocation, cloud computing di data center	Aplikasi/web	3	9	100	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2	Government Cloud Computing	Jumlah PD yang terlayani dengan Cloud Computing	PD	1	1	100	
3	Pelaksanaan Audit TIK	Laporan Hasil Audit Keamanan Sistem Informasi	Dokumen	1	1	100	Kasi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi
4	Penanganan Insiden Keamanan Informasi	Laporan Pengadaan Aplikasi Sekuriti Appliance	Dokumen	1	1	100	
5	Penyediaan Sarana Prasarana Komunikasi Pemerintah	Jumlah Layanan data Informasi penyediaan sarana dan prasarana komunikasi Pemerintah	Perangkat	1	1	100	Kasi Wasdal KPU/USO

	6 Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di Kaltim	Jumlah Layanan data Informasi KPU/USO di Kaltim	Laporan	1	1	100	
	7 Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos, dan telekomunikasi	Jumlah Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta tersedianya data informasi persandian	Laporan	1	1	100	Kasi Sandi dan Telekomunikasi
3	<b>Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik</b>	%	80	80	100	Kabid Informasi dan Komunikasi publik
	1 Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah melalui Poster, Leaflet, baliho, dll	1. Jumlah poster, leaflet, spanduk, baliho dan videotron	Laporan	1	1	100	Kasi Media Publik dan Pameran
	2 Dokumentasi dan Publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2. Jumlah Laporan dokumentasi publikasi	Laporan	1	1	100	
	3 Partisipasi pada Pameran/Expo/pekan kebudayaan daerah	3. Jumlah Pameran yang dilaksanakan	Laporan	1	1	100	



	4 Komunikasi Publik melalui dialog Interaktif radio dan televisi	4. Jumlah Dialog Interaktif radio dan televisi yang terlaksana	Laporan	1	1	100	Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi publik
4	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan Informasi Daerah	Persentase Lembaga yang mengembangkan Media Center Informasi Publik	%	27	27	100	Kabid Informasi dan Komunikasi publik
	1 Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Jumlah Media Center yang direvitalisasi	Media Center	3	3	100	Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi publik
	2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Kerjasama yang diselenggarakan dengan media publik	Laporan	1	1	100	
5	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase SDM yang memahami dan menguasai TIK	%	20	20	100	Kabid Aplikasi dan Informatika
	1 Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah laporan Kegiatan Pelatihan	Laporan	1	1	100	Kasi Pengembangan Sumber Daya TIK
		2. Jumlah laporan kegiatan sekretariat Tim Penilai Angka Kredit JFT Pranata Komputer	Laporan	1	1	100	

<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>Kabid Informasi dan Komunikasi publik</b>
	<i>1 Pengembangan Sumber Informasi Publik</i>	<i>Jumlah PD yang memiliki PPID di Kaltim</i>	<i>PD</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100</i>	<i>Kasi Pengelolaan Informasi Publik</i>
<b>7</b>	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Kabid Informasi dan Komunikasi publik</b>
	<i>1 Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>Jumlah Dokumen (RIPTIK)</i>	<i>Dokumen</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100</i>	<i>Kasi Pengembangan Sumber Daya TIK</i>

## 7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN KINERJA ( $\geq 100\%$ )	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	116,92	88,81	28,11

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 116,92% dapat tercapai dengan serapan anggaran sebesar 88,81%.



Effisiensi penggunaan anggaran program/kegiatan yang dialokasi pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10 Effisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Eeffisiensi	%	Total APBD		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	18.011.746.000,00	16.360.537.779,00	1,65 %	90,84	8.141.200.000,00	9.870.546.000,00	4	5	4	5	
2019	26.349.917.000,00	23.401.998.017,00	2,94 %	88,81	16.185.500.000,00	10.164.417.000,00	11	29	11	29	

Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran belanja langsung tahun 2018 dan 2019 sangat efisien karena selisih realisasi anggaran dengan target anggaran tidak terlalu jauh walaupun program/kegiatan yang dialokasikan memiliki jumlah yang berbeda.

#### D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	2,6	3,04	116,92	26.349.917.000,00	23.401.998.017,00	88,81

**2. Realisasi anggaran perprogram dan kegiatan**
**Tabel 3.12. Realisasi Anggaran perprogram dan kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	REALISASI	% CAPAIAN	
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>2,545,942,500</b>	<b>2,269,823,341</b>	<b>89,15</b>	<b>Kabid Aplikasi dan Informatika</b>
					<b>Kabid Teknologi Informasi dan Informatika</b>
	1. <i>Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK</i>	285,100,000	278,524,414	97,69	<i>Kasi Pengelolaan E-Government</i>
	2. <i>Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi/Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim</i>	166,700,000	160,120,420	96,05	<i>Kasi Pengolahan Domain dan Aplikasi</i>
	3. <i>Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah</i>	847,205,000	812,240,100	95,87	<i>Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>
	4. <i>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</i>	996,700,000	777,682,772	78,03	
	5. <i>Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim dan Kab/Kota</i>	250,237,500	241,255,635	96,41	<i>Kasi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem informasi</i>
<b>2</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo</b>	<b>1,521,050,000</b>	<b>1,472,457,435</b>	<b>96,81</b>	<b>Kabid Teknologi Informasi dan Informatika</b>
					<b>Kabid Pengawasan dan Pengendalian</b>
	1. <i>Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center dan DRC</i>	618,050,000	602,080,761	97,42	<i>Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>
	2. <i>Government Cloud Computing</i>	41,900,000	40,096,192	95,69	
	3. <i>Pelaksanaan Audit TIK</i>	75,500,000	73,681,460	97,59	<i>Kasi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi</i>
	4. <i>Penanganan Insiden Keamanan Informasi</i>	911,000,000	83,853,600	92,05	
	5. <i>Penyediaan Sarana Prasarana Komunikasi Pemerintah</i>	325,000,000	313,431,480	96,44	<i>Kasi Wasdal KPU/USO</i>
	6. <i>Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di Kaltim</i>	219,500,000	211,610,900	96,41	



	7. Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos, dan telekomunikasi	150,000,000	147,703,042	98,47	Kasi Sandi dan Telekomunikasi
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika</b>	<b>485,600,000</b>	<b>472,173,696</b>	<b>97,24</b>	<b>Kabid Informasi dan Komunikasi Publik</b>
	1. Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah melalui Poster, Leaflet, balliho, dll	175,000,000	173,109,500	98,92	Kasi Media Publik dan Pameran
	2. Dokumentasi dan Publikasi program/kegiatan perangkat daerah	127,000,000	116,162,196	91,47	
	3. Partisipasi pada Pameran/Expo/pekan kebudayaan daerah	153,600,000	153,068,000	99,65	
	4. Komunikasi Publik melalui dialog Interaktif radio dan televisi	30,000,000	29,834,000	99,45	Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi publik
<b>4</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan Informasi Daerah</b>	<b>2,333,625,000</b>	<b>2,008,939,485</b>	<b>86,09</b>	<b>Kabid Informasi dan Komunikasi Publik</b>
	1. Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	150,000,000	133,478,200	88,99	Kasi Pengelolaan Opini dan Komunikasi publik
	2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	2,183,625,000	1,875,461,285	88,89	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>381,200,000</b>	<b>360,756,860</b>	<b>94,64</b>	<b>Kabid Aplikasi dan Informatika</b>
	1. Peningkatan Sumber Daya TIK	381,200,000	360,756,862	94,64	Kasi Pengembangan Sumber Daya TIK
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>481,862,500</b>	<b>471,129,577</b>	<b>97,77</b>	<b>Kabid Informasi dan Komunikasi Publik</b>
	1. Pengembangan Sumber Informasi Publik	481,862,500	471,129,577	97,77	Kasi Pengelolaan Informasi Publik
<b>7</b>	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>212,000,000</b>	<b>208,114,416</b>	<b>98,17</b>	<b>Kabid Aplikasi dan Informatika</b>
	1. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	212,000,000	208,114,416	98,17	Kasi Pengembangan Sumber Daya TIK

## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 . Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Saran**

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2019, diperlukan saran-saran yang membangun antara lain :

- 1) Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- 2) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.